



Kerja Sama ASEAN Dalam Kerangka Ketahanan Pangan Regional

Imam Prasodjo¹, Moh.Nizar, S.IP., M.A.², Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.³

¹ Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Lampung

^{2,3} Dosen Hubungan Internasional, Universitas Lampung, Indonesia

Email: imam.prasodjo2002@students.unila.ac.id

ABSTRAK

Dunia menghadapi tantangan besar dalam ketahanan pangan akibat pemanasan global, perubahan iklim, dan pandemi Covid-19. Negara-negara ASEAN, meskipun sebagian besar merupakan negara agraris dengan lahan pertanian yang luas, tetap mengalami penurunan produksi pangan dan dampak krisis ekonomi global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama ASEAN dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat regional. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka dari buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi, dan situs web terkait. Kerangka analisis yang digunakan mengacu pada teori kerja sama internasional dan ketahanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN telah menginisiasi berbagai kebijakan dan kerja sama untuk meningkatkan ketahanan pangan regional. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih ada negara anggota yang mengalami kerawanan pangan serta tantangan signifikan dalam mengatasi kelaparan. Meskipun ada inisiatif ketahanan pangan di tingkat regional, kesenjangan antara kebijakan dan realisasi di lapangan masih menjadi kendala utama dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi seluruh negara anggota ASEAN.

Kata Kunci: kerja sama, ASEAN, dorongan, ketahanan pangan, regional.

ABSTRACT

The world faced significant challenges in food security due to global warming, climate change, and the Covid-19 pandemic. ASEAN countries, despite being largely agrarian with vast agricultural land, still experienced a decline in food production and the impact of the global economic crisis. This study aimed to analyze ASEAN cooperation in strengthening regional food security. The research used a qualitative descriptive method with secondary data collection through literature studies from books, scientific journals, articles, official reports, and relevant websites. The analytical framework referred to the theories of international cooperation and food security. The findings indicated that ASEAN had initiated various policies and collaborations to enhance

regional food security. However, the implementation of these policies was not entirely effective, as some member countries still faced food insecurity and significant challenges in addressing hunger. Despite the regional food security initiatives, the gap between policy and actual implementation remained a major obstacle to achieving sustainable food security for all ASEAN member states.

Keywords: *cooperation, ASEAN, encouragement, food security, regional.*

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan menjadi isu global yang semakin mendesak akibat pemanasan global, perubahan iklim, pandemi Covid-19, serta krisis ekonomi yang menyebabkan ketidakstabilan pasokan pangan. Konsep ketahanan pangan merujuk pada kondisi di mana setiap individu memiliki akses stabil terhadap pangan yang aman dan bergizi untuk mendukung kesejahteraan mereka (FAO, 2008). Krisis pangan yang pernah terjadi pada 1970-an menjadi latar belakang munculnya konsep ini. Dalam konteks Asia Tenggara, negara-negara ASEAN menghadapi tantangan besar dalam mencapai ketahanan pangan akibat berbagai faktor eksternal dan internal yang menghambat produksi serta distribusi pangan.

Negara-negara ASEAN mengalami penurunan produksi pangan rata-rata 5% hingga 10% dalam beberapa tahun terakhir akibat perubahan iklim, seperti banjir dan kekeringan (AFSIS, 2022). Kondisi ini diperparah oleh inflasi yang menyebabkan kenaikan harga pangan sebesar 3% hingga 5% pada tahun 2022 (Zhou & Chen, 2023). Pandemi Covid-19 juga memperburuk situasi dengan menghambat distribusi pangan, menyebabkan 48,8 juta orang kesulitan mengakses bahan pangan pokok (FAO, 2022). Ketidakmampuan beberapa negara ASEAN dalam mengatasi tantangan ini berdampak pada meningkatnya tingkat kerawanan pangan di kawasan, terutama di negara-negara seperti Myanmar dan Kamboja yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pangan yang cukup dan bergizi (Harrington, dkk., 2022).

Ironisnya, sebagian besar negara ASEAN merupakan negara agraris yang memiliki lahan pertanian luas dan menjadi penyumbang pangan global, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina (Kominfo, 2023). Namun, adanya kesenjangan dalam tingkat ketahanan pangan antarnegara menunjukkan bahwa sumber daya pertanian yang melimpah tidak selalu sejalan dengan kemampuan negara dalam menjamin ketersediaan pangan bagi penduduknya. Negara-negara dengan sektor industri dominan seperti Singapura dan Brunei Darussalam juga bergantung pada impor pangan, yang semakin rentan terhadap guncangan ekonomi global. Selain itu, keterbatasan ekonomi menjadi faktor yang memperburuk situasi, seperti Laos yang memiliki tingkat kemiskinan mencapai 23,1% pada tahun 2021 (UNDP, 2023), sehingga akses terhadap pangan berkualitas semakin sulit bagi masyarakat miskin.

Permasalahan ketahanan pangan di ASEAN semakin kompleks dengan adanya pertumbuhan populasi yang pesat, berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian, serta perubahan dalam sistem produksi pangan yang belum optimal (Yudhatama, dkk., 2021). Indeks ketahanan pangan global menunjukkan bahwa selama periode 2020–2022, negara-negara ASEAN tidak mengalami peningkatan signifikan dalam peringkatnya, dengan skor rata-rata 62,2 yang mengukur keterjangkauan, ketersediaan, kualitas pangan, serta ketahanan sumber daya alam (Harrington, dkk., 2022). Hal ini menandakan bahwa upaya yang dilakukan masih belum cukup untuk menjamin ketahanan pangan di seluruh kawasan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama regional yang lebih erat untuk mengatasi berbagai tantangan ini.

Sebagai organisasi regional, ASEAN memiliki peran penting dalam mengoordinasikan kebijakan dan strategi ketahanan pangan bagi negara-negara anggotanya. ASEAN telah mengembangkan berbagai inisiatif seperti integrasi ketahanan pangan untuk memperkuat

sistem pangan regional, termasuk peningkatan produksi pangan, perdagangan pangan yang berkelanjutan, serta mitigasi krisis pangan di masa depan (FAO, 2023). Selain itu, ASEAN juga memainkan peran signifikan dalam diplomasi internasional dengan memfasilitasi kerja sama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, dan Rusia guna menjaga stabilitas ekonomi dan perdagangan pangan di kawasan (KEMLU, 2019). Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan stabilitas sosial dan politik ASEAN secara keseluruhan.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, ketahanan pangan merupakan aspek fundamental dalam menciptakan kesejahteraan dan stabilitas di ASEAN. Meskipun kawasan ini dikenal sebagai penghasil pangan global, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam tingkat ketahanan pangan antarnegara. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan dampak pandemi semakin memperburuk kondisi ini, sehingga memerlukan langkah kolektif dari ASEAN untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada pertanyaan utama: "Bagaimana kerja sama ASEAN dalam mendorong ketahanan pangan regional?"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari perspektif individu atau kelompok dalam menanggapi masalah sosial kemanusiaan, dengan menitikberatkan pada proses serta interpretasi hasil melalui penggunaan kata-kata daripada angka. Selain itu, berupaya memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai keadaan yang sedang berlangsung. Metode deskriptif digunakan untuk menganalisis bagaimana kerja sama yang dilakukan ASEAN berkontribusi dalam mendorong ketahanan pangan regional.

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan teknik berbasis dokumentasi. Data-data dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui interpretasi dan kajian literatur, dokumen, dan laporan resmi dari institusi resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. sebagai sumber data yang bersumber dari jurnal ilmiah, artikel, dan website pemerintah, diantaranya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Data juga diperoleh dari berbagai website resmi internasional yang diakui, seperti website FAO, ASEAN, APTERR, indeks ketahanan pangan global, dan indeks kelaparan global, serta data dalam penelitian ini juga diperoleh dari laporan internasional yang diakui, seperti prospek komoditas pertanian ASEAN, laporan keamanan pangan terpadu ASEAN, perjanjian cadangan keamanan pangan ASEAN, dan forum AMAF. Selain itu juga data diperoleh dari situs berita seperti Kompas dan CNN yang telah dikumpulkan dan menyaring data yang relevan.

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kerja Sama Yang Dilakukan ASEAN Dalam Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan sebuah isu yang menjadi tantangan bersama bagi negara anggota ASEAN. Pembahasan dimulai dengan mendeskripsikan ASEAN sebagai organisasi regional dalam ketahanan pangan, yang bertujuan memberi konteks pada peran dan relevansi ASEAN dalam masalah ketahanan pangan. Mendeskripsikan pertemuan yang dilakukan ASEAN sebagai bentuk inisiatif dalam mencapai ketahanan pangan. Selanjutnya, bab ini

akan memaparkan bentuk kerja sama konkret yang dijalankan ASEAN dalam ketahanan pangan di kawasan. Melalui pendeskripsian ASEAN dalam ketahanan pangan, pertemuan yang dilakukan ASEAN, dan juga kerja sama yang dilakukan ASEAN dalam ketahanan pangan, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait isu ketahanan pangan ASEAN di tingkat regional.

A.1. ASEAN Dalam Ketahanan Pangan

ASEAN adalah organisasi regional yang didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Organisasi ini dibentuk oleh lima perwakilan negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pembentukan organisasi ini diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok di Aula Departemen Luar Negeri Thailand (ASEAN, 2024). Deklarasi Bangkok menjadi awal ASEAN untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai tempat bagi negara-negara Asia Tenggara untuk bekerja sama dalam berbagai aspek. Sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam deklarasi yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, memajukan stabilitas, perdamaian, kolaborasi aktif dalam sektor pertanian, industri, dan perdagangan, serta membantu satu sama lain dalam berbagai hal (ASEAN, 2024). Penandatanganan deklarasi di Bangkok menjadikan ASEAN sebagai wadah bersama dalam membangun kawasan Asia Tenggara secara damai, aman, dan makmur. Selain itu sesuai juga menjadikan kawasan ASEAN sebagai rumah untuk sepuluh negara anggota mulai dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja (ASEAN, 2024).

Untuk dapat menguatkan komitmen negara-negara anggota pada tahun 2008, ASEAN menetapkan Piagam ASEAN menjadi dasar dalam menjalankan berbagai kerja sama regional dan internasional. Piagam ini menetapkan prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan bagi negara-negara anggota dalam menjalin kerja sama. Prinsip-prinsip itu mencakup penghormatan terhadap kedaulatan, tidak melakukan campur tangan dalam urusan domestik negara lain, serta penyelesaian sengketa dengan cara yang damai (ASEAN, 2008). Selain itu, Piagam ASEAN juga memuat tujuan utama organisasi ini, salah satunya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara melalui kerja sama antar negara anggota (ASEAN, 2024). Dalam konteks kerja sama internasional, ASEAN berusaha membangun integrasi ekonomi yang lebih kuat dengan mitra eksternal strategis ASEAN seperti China, Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan India (ASEAN, 2024).

Dengan adanya Piagam ASEAN untuk memperkuat kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya salah satu aspek lainnya yang perlu diperhatikan adalah untuk mencapai ketahanan pangan kawasan (ASEAN, 2008). Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus penting dalam tercapainya tujuan Piagam ASEAN tersebut, dimana ASEAN berkomitmen untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui kerja sama di bidang pertanian dan pengelolaan sumber daya alam (ASEAN, 2015). Ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan makanan, tetapi juga mencakup aksesibilitas, stabilitas, dan keberlanjutan sumber pangan bagi seluruh individu (FAO, 2015). Kerja sama dalam ketahanan pangan bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi kemiskinan, dan memastikan ketersediaan serta akses pangan yang stabil bagi seluruh individu (ASEAN, 2024).

Negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, kerja sama di bidang ketahanan pangan menjadi prioritas utama ASEAN untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, baik dari segi kualitas maupun kuantitas (ASEAN, 2015). ASEAN memiliki peran

strategis dalam menjamin ketahanan pangan di Asia Tenggara melalui penguatan kerja sama regional yang terstruktur dan efektif. Kerja sama ini menghasilkan integrasi regional yang menjadi landasan penting bagi negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan yang kompleks, baik saat ini maupun di masa mendatang (Banjar, 2023). Setiap kebijakan dan perjanjian yang dirumuskan ASEAN melalui tahap diskusi bersama bertujuan menciptakan kesepakatan yang disetujui oleh seluruh negara anggota.

Salah satu langkah nyata peran ASEAN dalam ketahanan pangan adalah pembentukan inisiatif kerja sama regional yang bertujuan membangun cadangan beras di tingkat kawasan sebagai upaya menghadapi krisis pangan. Kebijakan kerja sama ini tidak hanya meningkatkan persediaan pangan, tetapi juga menumbuhkan solidaritas dan tanggung jawab bersama antarnegara anggota ASEAN dalam menjaga ketersediaan pangan (Banjar, 2023). Untuk mencapai ketahanan pangan di kawasan, ASEAN juga melaksanakan berbagai inisiatif kerja sama regional yang meliputi peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas petani (ASEAN, 2020). Melalui inisiatif-inisiatif tersebut, ASEAN berupaya mengatasi masalah ketahanan pangan secara komprehensif dengan berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, serta bekerja sama dalam program-program yang bertujuan meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan di kawasan (Banjar, 2023).

ASEAN memiliki visi untuk melindungi masyarakat dari ancaman pangan yang tidak aman. Untuk mencapai tujuan ini, ASEAN bekerja sama dalam mengembangkan standar keamanan pangan yang terpadu serta memperkuat sistem inspeksi dan pengawasan pangan di kawasan (Banjar, 2023). Upaya ini menunjukkan bahwa ASEAN tidak hanya berfokus pada aspek kuantitas pangan, tetapi juga pada kualitas dan keamanan pangan yang tersedia bagi masyarakat. Melalui pendekatan kerja sama ketahanan pangan yang kolektif dan komprehensif, ASEAN berhasil membangun ketahanan pangan regional yang lebih kuat serta responsif terhadap berbagai tantangan yang mungkin dihadapi kawasan di masa depan (Banjar, 2023).

Holsti dalam teorinya, mengenai kerja sama internasional menekankan bahwa kerja sama internasional, terbentuk karena adanya kebutuhan untuk mencapai stabilitas keamanan, pembangunan ekonomi, dan menghindari konflik (Holsti, 1988). Dari sudut pandang ini, pembentukan ASEAN pada tahun 1967, yang mana tertuang dalam Deklarasi Bangkok bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sosial serta memastikan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, dan hal tersebut sejalan dengan prinsip Holsti yang mana negara cenderung berkolaborasi ketika menghadapi ancaman bersama atau memiliki kepentingan bersama serta pembentukan ASEAN juga didasarkan pada kesadaran bahwa kebijakan negara lain dapat mendukung kepentingan nasional masing-masing. Misalnya, kebijakan perdagangan terbuka dan stabilitas politik di satu negara dapat memberikan dampak positif bagi negara lain dalam bentuk investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas (ASEAN, 2024).

Piagam yang dibuat ASEAN juga menegaskan prinsip-prinsip dasar, yaitu penghormatan terhadap kedaulatan, tidak campur tangan dalam urusan domestik negara lain, dan penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi negara-negara anggota untuk bekerja sama secara efektif tanpa mengorbankan otonomi nasional masing-masing (ASEAN, 2008). Prinsip tersebut sejalan dengan pandangan K.J. Holsti, yang menyatakan bahwa kerja sama didasarkan pada kesamaan kepentingan, aturan resmi, serta mekanisme transaksi yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan bersama yang memungkinkan negara-negara berkolaborasi secara kolektif sembari tetap mempertahankan hak-hak dan kewenangan sebagai entitas berdaulat (Holsti, 1988).

A.2. Pertemuan ASEAN

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pertama yang diadakan pada 23-24 Februari 1976 di Bali merupakan tonggak penting dalam sejarah kerja sama kawasan Asia Tenggara. Perhelatan ini tidak hanya menandai komitmen para negara pendiri ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dalam mempererat hubungan, tetapi juga menjadi respons strategis terhadap dinamika geopolitik yang berkembang pesat pada masa itu (Muhamad, 2011). Persaingan kekuatan besar di kawasan Asia Pasifik, termasuk pengaruh Perang Dingin yang masih terasa, mendorong negara-negara ASEAN untuk bersatu dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan regional. Selain itu, KTT ini mencerminkan kesadaran kolektif negara-negara anggota ASEAN akan pentingnya kerja sama yang lebih erat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan (Muhamad, 2011). Dengan memperkuat ikatan persaudaraan serta memperdalam kolaborasi di berbagai sektor, ASEAN berharap dapat menghadapi tantangan global secara lebih solid dan memperkuat posisinya di kancah internasional.

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pertama yang diselenggarakan di Bali menciptakan fondasi yang kuat bagi ASEAN untuk berkembang menjadi organisasi yang berpengaruh di kawasan. KTT tersebut tidak hanya berhasil merumuskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi panduan ASEAN hingga saat ini, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan solidaritas di antara negara-negara anggotanya (Muhamad, 2011). Kesepakatan yang dicapai dalam konferensi ini membuka jalan bagi berbagai program kerja sama di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. KTT pertama di Bali juga melahirkan Deklarasi Bali atau *The Declaration of Concord I*, sebuah dokumen yang menjadi landasan kerja sama antarnegara ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan di kawasan ASEAN (Lestari, 2008).

Deklarasi Bali yang diselenggarakan pada 23-24 februari 1976 yang bertempat di Bali, merupakan kesepakatan yang ditandatangani oleh lima negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipin, Singapura, dan thailand, pada konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pertama (ASEAN, 2012). Deklarasi Bali terjadi di dalam konteks politik global yang penuh tantangan, terutama setelah perang Vietnam dan meningkatnya pengaruh rezim komunis di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada 1967 dengan tujuan menjaga stabilitas regional, dan Deklarasi Bali menandai langkah besar dalam memperkuat solidaritas antar negara anggotanya. Komitmen untuk menjaga perdamaian di kawasan merupakan respons langsung, terhadap ketegangan global di era Perang Dingin (Koh, Li-Lian, & Lin, 2017).

Deklarasi Bali berfungsi sebagai fondasi untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga keamanan regional. Oleh karena nya deklarasi tersebut memuat komitmen bersama antar negara anggota, untuk tidak mencampuri urusan internal masing-masing negara, menghormati kedaulatan nasional, dan menyelesaikan perselisihan dengan cara damai melalui dialog (Lestari, 2008). Pendekatan ini menjadi esensi dari prinsip non-intervensi yang kemudian menjadi salah satu ciri khas kebijakan luar negeri ASEAN (ASEAN, 2012). Deklarasi Bali juga mencerminkan dari pendekatan lembut ASEAN dalam diplomasi regional, di mana kerja sama difokuskan pada upaya penguatan hubungan persahabatan dan penyelesaian konflik secara damai. Implementasi dari deklarasi ini membantu menciptakan persepsi positif ASEAN sebagai kawasan yang stabil dan aman bagi para investor dan pelaku bisnis internasional (Desker, 2017).

Deklarasi Bali yang disepakati dalam pertemuan pertama ASEAN tahun 1976 memiliki tujuan utama untuk memperkuat kerja sama di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Deklarasi ini juga memperkuat konsep Zona Damai, Bebas, dan Netralitas (ZOPFAN), yang sebelumnya diadopsi pada tahun 1971, dengan menekankan bahwa Asia Tenggara harus menjadi kawasan yang damai dan bebas dari campur tangan eksternal (Ganesan, 2000). Melalui deklarasi ini, ASEAN berkomitmen menjadikan Asia Tenggara sebagai wilayah yang damai, bebas dari intervensi, dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Komitmen ini didasarkan pada prinsip tidak adanya intervensi serta penyelesaian konflik secara damai, yang menjadi dasar hubungan antarnegara ASEAN (Woon, 2008). Hingga saat ini, Deklarasi Bali tetap relevan sebagai pijakan utama dalam pengembangan kerja sama ASEAN. Semangat yang terkandung dalam deklarasi tersebut diteruskan melalui Deklarasi Bali II pada tahun 2003, yang memperkenalkan konsep komunitas ASEAN mulai dari komunitas politik-keamanan, komunitas ekonomi, dan komunitas sosial budaya (ASEAN, 2008). Deklarasi Bali juga menjadi landasan pengembangan kerja sama regional di berbagai sektor, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan pangan, dan penanganan bencana (ASEAN, 2012).

Forum Menteri pertanian dan kehutanan ASEAN merupakan sebuah forum pertemuan para menteri yang pertama kali dibentuk pada tahun 1977 (Nurwanti, 2010). Forum ini berfungsi sebagai salah satu bentuk konkret implementasi kerja sama regional yang berlandaskan Deklarasi Bali tahun 1976, yang menekankan pentingnya integrasi di bidang pertanian dan kehutanan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi serta ketahanan pangan di Asia Tenggara (ASEAN, 2012). Implementasi ini sejalan dengan visi kerja sama ASEAN di bidang pertanian dan pangan, yaitu mewujudkan sektor makanan, pertanian, dan kehutanan yang lebih kompetitif, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, guna mendukung ketahanan pangan dan gizi di kawasan ASEAN (ASEAN, 2024).

Sejak pembentukannya, AMAF berperan sentral dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan program-program di tingkat regional yang bertujuan memperkuat sektor pertanian dan kehutanan negara-negara anggota ASEAN. Salah satu tujuan utama pembentukan AMAF adalah memfasilitasi berbagai inisiatif dan program ketahanan pangan yang telah disepakati dalam Deklarasi Bali (ASEAN, 2012). Forum tersebut berfungsi sebagai mekanisme antarnegara anggota ASEAN untuk menyusun kebijakan terkait pertanian dan kehutanan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas, tetapi juga perlindungan sumber daya alam dan penanggulangan perubahan iklim (Nurwanti, 2010). Pendekatan ini mencerminkan komitmen holistik ASEAN dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan sumber daya alam di kawasan. Salah satu contoh penting hasil pertemuan AMAF adalah terbentuknya perjanjian cadangan pangan ASEAN di sektor beras pada tahun 1979, yang bertujuan menjaga cadangan pangan di kawasan sebagai langkah antisipasi menghadapi krisis pangan (ASEAN, 1979).

Konteks ketahanan pangan, AMAF berperan strategis dalam memastikan terciptanya sistem pangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di kawasan. Melalui inisiatif-inisiatif yang diusung oleh AMAF dengan berupaya untuk meningkatkan kemandirian pangan ASEAN dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan dari negara-negara luar kawasan, terutama dalam situasi krisis global (Nurwanti, 2010). Implementasi upaya tersebut adalah dengan adanya program cadangan beras ASEAN dengan melibatkan negara-negara anggota ASEAN beserta negara mitra seperti Jepang, Korea Selatan, dan China dalam, menyediakan pasokan cadangan beras yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota dalam keadaan darurat pangan (ASEAN, 2011).

Melalui forum ini, negara anggota ASEAN diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan global, serta memastikan daya saing di pasar internasional, khususnya dalam sektor-sektor pertanian yang menjadi tulang punggung

perekonomian beberapa negara anggota, seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam (Lamberte, 2016). Selain fokus pada ketahanan pangan, kerja sama di bawah naungan forum ini juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani dan komunitas lokal melalui penguatan kapasitas produksi serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (ASEAN, 2022).

K.J Holsti melihat bahwa, Deklarasi Bali pada tahun 1976 dan forum pertemuan menteri pertanian dan kehutanan ASEAN merupakan sebuah perwujudan dari motivasi dasar dalam kerja sama internasional yaitu, kedua pertemuan ASEAN tersebut memiliki tujuan untuk dapat menjaga keamanan, stabilitas kawasan, mengelola kepentingan bersama, dan menghadapi tantangan yang dihadapi bersama di masa depan (ASEAN, 2012). Deklarasi Bali I maupun AMAF mencerminkan kerja sama internasional sebagaimana dikemukakan oleh Holsti, di mana keputusan dan kebijakan yang dibuat negara-negara ASEAN bertujuan untuk menciptakan stabilitas, kesejahteraan, dan ketahanan pangan tanpa merugikan pihak mana pun yang mana hal tersebut untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama dan juga meningkatkan kesejahteraan bersama melalui mekanisme multilateral (Holsti, 1988).

A.3. Kerja Sama Ketahanan Pangan ASEAN

Perjanjian keamanan cadangan beras ASEAN merupakan sebuah perjanjian multilateral yang mengikat secara hukum, dan secara resmi disepakati dan ditandatangani oleh negara-negara anggota ASEAN pada 4 Oktober 1979 di New York, Amerika Serikat (ASEAN, 1979). Yang mana perjanjian tersebut mengatur pembentukan cadangan pangan ASEAN, yang mana utamanya yaitu cadangan beras, yang digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan regional. Perjanjian tersebut juga memuat komitmen dan kewajiban hukum dari negara-negara anggota ASEAN untuk menyediakan sejumlah cadangan beras yang bisa digunakan oleh negara anggota lainnya dalam situasi darurat atau kekurangan pangan (ASEAN, 1979). Perjanjian keamanan cadangan beras ASEAN tersebut dibuat sebagai respons atas kekhawatiran terhadap krisis pangan global yang terjadi pada dekade 1970-an, yang berdampak pada negara-negara berkembang, termasuk di Asia Tenggara (FAO, 1983).

Sebagai langkah awal perjanjian tersebut menetapkan kerangka kerja yaitu, bagaimana cadangan beras akan dikelola, dipertukarkan, dan diakses oleh negara-negara anggota ASEAN dalam keadaan darurat (ASEAN, 1979). Yang mana hal tersebut dilihat dari perspektif kerja sama internasional, AFSRA merupakan bukti nyata dari adanya solidaritas regional untuk dapat mengatasi tantangan bersama yaitu tantangan akan ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang mana merupakan isu yang strategis dalam perspektif kerja sama internasional dimana isu tersebut tidak hanya berhubungan dengan stabilitas domestik, tetapi juga keamanan regional (ASEAN, 1985). Perjanjian keamanan cadangan beras ASEAN yang disepakati pada tahun 1979 memiliki tujuan untuk menciptakan cadangan pangan regional guna menghadapi kemungkinan krisis pangan kedepannya (ASEAN, 1979). Perjanjian keamanan cadangan beras ASEAN telah menjadi fondasi utama bagi inisiasi awal berbagai bentuk kerja sama pangan lainnya di kawasan ASEAN, dimana komitmen yang tertuang dalam perjanjian tersebut mewajibkan negara anggota untuk dapat menyediakan cadangan beras, yang dapat digunakan oleh negara anggota ASEAN yang lain, ketika sedang dalam menghadapi kekurangan pangan. Mekanisme ini diwujudkan melalui cadangan keamanan pangan ASEAN dengan sepakat menyimpan stok beras tertentu yang siap disalurkan jika terjadi kondisi darurat (ASEAN, 1979).

Cadangan keamanan pangan ASEAN merupakan sebuah kesepakatan kerja sama yang konkret mengenai ketahanan pangan, dimana kesepakatan tersebut ditandatangani pada tahun 1979 (ASEAN, 1979). Kesepakatan tersebut sebagai bentuk respon terhadap tantangan ketahanan pangan yang dialami negara-negara ASEAN pada saat itu. Pembentukan kerja

sama cadangan ketahanan pangan ASEAN tidak hanya berfungsi untuk memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga sebagai bagian dari diplomasi regional (ASEAN, 1979). Kerja sama dalam bidang pangan ini memperkuat solidaritas ASEAN, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi kawasan (KEMENTAN, 2023). Pembentukan cadangan ketahanan pangan ASEAN sebagai langkah kolektif untuk menghadapi krisis pangan di masa depan yang bertujuan untuk memastikan adanya stok pangan, khususnya beras, yang tersedia bagi negara anggota ASEAN pada saat terjadinya krisis pangan atau keadaan darurat yang dapat mengancam ketahanan pangan regional. Selain itu, cadangan ketahanan pangan ASEAN juga diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa negara-negara anggota ASEAN memiliki mekanisme pangan yang baik ketika terjadi krisis yang mengancam ketahanan pangan di salah satu atau lebih negara anggota (ASEAN, 1979). Dengan adanya cadangan pangan ini, negara-negara ASEAN dapat saling mendukung untuk menjaga stabilitas pangan di kawasan.

Kerja sama cadangan ketahanan pangan ASEAN, menetapkan penyediaan beras sebanyak 50.000 ton yang berasal dari kontribusi masing-masing negara anggota ASEAN sesuai dengan kuota yang telah disepakati (ASEAN, 1979). Kuota ini diatur dalam kesepakatan berdasarkan kemampuan masing-masing negara untuk menyediakan beras, serta kebutuhan nasional mereka. Thailand dan Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan penghasil beras utama di ASEAN, menyumbang porsi terbesar dari cadangan beras ini, dimana Thailand menyumbang sebanyak 15.000 ton, dan Indonesia menyumbang cadangan beras sebanyak 12.000 ton (ASEAN, 1979). Kesepakatan yang dibuat tidak hanya diperuntukan untuk Thailand dan Indonesia saja sebagai negara yang menghasilkan beras terbesar di ASEAN, namun di dalam kerja sama tersebut disepakati juga bahwa negara-negara anggota ASEAN yang lainnya juga turut menyumbang dalam kesepakatan kerja sama ini. Yang mana kesepakatan tersebut Malaysia menyumbang cadangan beras sebanyak 6.000 ton, Filipina dan Singapura sebanyak 5.000 ton, dan Brunei Darussalam sebanyak 3.000 ton (ASEAN, 1979). Kuota ini memungkinkan distribusi yang adil dan efisien dalam mengatasi kekurangan pangan regional. Pada tahun 2008, cadangan ketahanan pangan ASEAN memiliki stok cadangan beras darurat yang dikelola di ASEAN sebanyak 87.000 ton, yang dapat dialokasikan untuk kepentingan negara anggota ASEAN (ASEAN, 2023). Mekanisme kerja sama yang dijalankan diimplementasikan melalui pengaturan operasional yang jelas, mencakup kapan dan bagaimana cadangan beras dapat diakses oleh negara-negara anggota. Apabila suatu negara menghadapi krisis pangan, mereka dapat mengajukan permohonan untuk menarik cadangan pangan dari cadangan ketahanan pangan ASEAN tersebut (ASEAN, 1979).

Proses penarikan cadangan pangan ini memerlukan verifikasi atas kondisi krisis yang dihadapi, serta persetujuan dari negara anggota lainnya. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan cadangan pangan regional serta kebutuhan mendesak akan pangan di kawasan (ASEAN, 2023). Salah satu tantangan utama dalam implementasi kerja sama ini adalah menjaga ketersediaan stok beras agar tetap memadai dan dapat diakses secara tepat waktu. Seiring dengan semakin kompleksnya ancaman terhadap ketahanan pangan yang dihadapi, ASEAN mengembangkan inisiatif tambahan untuk memperkuat ketahanan pangan. Salah satunya adalah kerja sama cadangan beras darurat ASEAN yang melibatkan negara-negara mitra seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas kapasitas cadangan pangan regional dan meningkatkan efektivitas penanganan krisis pangan (ASEAN, 2011).

Kerja sama cadangan beras darurat ASEAN Plus Tiga merupakan salah satu bentuk kerja sama regional yang penting dalam konteks ketahanan pangan di kawasan Asia Timur dan

Asia Tenggara. Kerja sama ini diinisiasi secara kolektif oleh negara-negara ASEAN bersama tiga mitra dialog utama, yaitu Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Tujuan utama dari pembentukan kerja sama cadangan beras darurat ini adalah untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan yang sering dihadapi oleh negara-negara anggota dan mitra ASEAN, seperti bencana alam, ketidakstabilan harga pangan, serta fluktuasi pasokan (ASEAN, 2011). Inisiatif ini berperan krusial dalam menciptakan stabilitas dan keamanan pangan di kawasan yang memiliki populasi besar dan tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim serta dinamika pasar global (APTERR, 2023). Perjanjian kerja sama cadangan beras darurat ASEAN bersama mitra seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan ditandatangani pada 7 Oktober 2011 di Jakarta. Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN bersama Menteri Pertanian dan Kehutanan negara-negara mitra, dan mulai berlaku pada 12 Juli 2012 setelah diratifikasi oleh seluruh negara anggota (APTERR, 2023).

Langkah pembentukan kerja sama ini diambil sebagai respons atas tingginya volatilitas harga pangan global yang memuncak selama krisis pangan tahun 2007–2008. Pada masa tersebut, banyak negara di kawasan Asia mengalami lonjakan harga beras yang menyebabkan kesulitan ekonomi bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, pembentukan kerja sama cadangan beras ini diharapkan dapat memberikan solusi yang sistematis dan terstruktur dalam penanganan krisis pangan di masa depan (APTERR, 2023). Mekanisme dari kerja sama cadangan beras darurat ASEAN plus tiga yaitu mekanismenya dengan menyediakan cadangan beras. Mekanisme cadangan beras yang disediakan tersebut dapat dengan mudah diakses oleh para negara anggota ASEAN bersama dengan negara mitra ASEAN ketika terjadi bencana alam atau krisis pangan yang mengancam ketersediaan pangan di negara tersebut (APTERR, 2023). Melalui mekanisme ini, negara-negara yang terdampak dapat menerima bantuan beras dalam bentuk pinjaman atau hibah yang diambil dari stok cadangan regional (APTERR, 2023). Dengan demikian, APTERR juga memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas pasar domestik di negara-negara anggotanya, sekaligus mencegah lonjakan harga beras yang bisa berdampak negatif pada masyarakat (ASEAN, 2011).

Mekanisme pemanfaatan cadangan beras darurat ASEAN Plus Tiga secara resmi ditetapkan pada 28–29 Maret 2013, bertepatan dengan pertemuan pertama Dewan Kerja Sama Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga di Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa kerja sama ini akan dikelola oleh Sekretariat ASEAN Plus Tiga yang berbasis di Bangkok. Penetapan ini juga menandai peluncuran resmi kantor Sekretariat ASEAN Plus Tiga pada 29 Maret tahun 2013 (APTERR, 2023). Sekretariat tersebut bertugas memantau dan mengoordinasikan distribusi cadangan beras berdasarkan kebutuhan. Pengelolaan ini melibatkan kerja sama teknis antarnegara anggota untuk memastikan distribusi beras dilakukan secara cepat dan efisien dalam kondisi darurat (ASEAN, 2011).

Untuk melaksanakan mekanisme tersebut, terdapat tiga program utama dalam kerja sama cadangan beras darurat ASEAN Plus Tiga yang dirancang untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan di kawasan (APTERR, 2023). Program pertama dalam mekanisme tersebut melibatkan pelepasan cadangan beras darurat yang dialokasikan berdasarkan ketentuan pra-pengaturan sebagai langkah antisipasi keadaan darurat. Program ini diformalkan melalui kontrak berjangka yang mencakup jumlah dan mutu beras, metode penetapan harga, ketentuan pembayaran dan pengiriman, serta persyaratan lainnya yang disepakati antara negara pemasok dan negara penerima (APTERR, 2023). Program dalam mekanisme kerja sama ini yaitu pada tingkat kedua yang melakukan penanganan keadaan darurat yang tidak

dapat ditangani oleh program tingkat pertama. Pelepasan beras pada tingkat ini dilakukan melalui kesepakatan tambahan antara negara pemasok dan negara penerima, termasuk penetapan harga yang dapat dibayarkan secara tunai, pinjaman, atau hibah jangka panjang, sesuai persetujuan bersama (APTERR, 2023).

Program terakhir yang terdapat dalam mekanisme tersebut adalah program tingkat ketiga, yang mana dalam mekanisme ini program tingkat ketiga melibatkan pelepasan cadangan beras darurat yang telah ditimbun untuk keadaan darurat serius serta sebagai bahan tanggap darurat kemanusiaan, seperti penyelesaian masalah kemiskinan dan pemberantasan kekurangan gizi, untuk memastikan keamanan pangan di wilayah tersebut. Pada program tingkat ketiga ini juga dapat menjadi jalur cepat untuk dapat membantu permasalahan secara otomatis (APTERR, 2023). Kerja sama cadangan beras darurat ASEAN bersama negara mitra dimana memiliki stok cadangan beras, yang dialokasikan berjumlah sebanyak 787.000 ton, yang terdiri 87.000 ton berasal dari negara-negara ASEAN, dan sebanyak 700.000 ton berasal dari negara-negara plus three (APTERR, 2023).

Cadangan beras darurat yang ditimbun oleh kerja sama cadangan pangan darurat ASEAN bersama negara mitra merupakan sebuah cadangan beras yang berasal dari sumbangan yang diberikan secara sukarela kepada pengelola kerja sama cadangan pangan darurat ASEAN dalam bentuk uang tunai atau stok beras fisik. Cadangan beras yang terdapat dalam kerja sama tersebut dimiliki secara kolektif oleh negara anggota dan dikelola oleh Sekretariat di bawah pengawasan dewan pengawas, serta cadangan beras darurat yang ditimbun tersebut digunakan sebagai stok darurat untuk menyediakan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat (APTERR, 2023). Seiring waktu, mekanisme ini telah membantu memperkuat hubungan diplomatik antara negara anggota ASEAN dan negara mitra seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dengan menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di kawasan (ASEAN, 2011). Mekanisme ini, yang berfokus pada bantuan kemanusiaan di bidang pangan, juga melengkapi upaya regional yang lebih luas, seperti kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN. Kerangka ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan jangka panjang melalui pengembangan sektor pertanian dan distribusi hasil pertanian, sekaligus untuk memastikan respons cepat dalam menghadapi krisis (Hermanto, 2014).

Kerja sama cadangan beras darurat ASEAN bersama negara mitra membuktikan bahwa kerja sama internasional di bidang pangan dan pertanian tidak selalu harus berfokus pada perdagangan. Mekanisme ini mencakup aspek yang lebih luas, seperti bantuan kemanusiaan dan jaminan ketahanan pangan. Selain itu, keberadaan kerja sama ini juga memperkuat peran ASEAN sebagai organisasi regional yang tanggap terhadap tantangan ketahanan pangan (Hermanto, 2014). Kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN merupakan langkah strategis yang diinisiasi oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memastikan ketahanan pangan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara (FAO, 2023). Kerangka kerja ini secara resmi dibentuk pada tahun 2009 dalam KTT ASEAN ke-14 di Cha-am Hua Hin, Thailand. Inisiatif tersebut lahir sebagai respons terhadap krisis pangan global tahun 2007–2008 dan bertujuan mendukung upaya ASEAN dalam mengintegrasikan kebijakan pangan serta memastikan stabilitas pangan di kawasan (AIFS, 2009). ASEAN menyadari pentingnya kerja sama regional yang lebih erat untuk menjamin ketersediaan pangan yang stabil, terjangkau, dan berkualitas bagi lebih dari 650 juta penduduk di kawasan ini (AIFS, 2009). Krisis pangan global tahun 2007–2008 juga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pembentukan cadangan beras darurat ASEAN plus tiga pada tahun 2011. Kerja sama tersebut merupakan bagian dari kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN yang dirancang untuk

menyediakan cadangan beras darurat di tingkat regional (APTERR, 2023). Sebagai bagian dari kerangka kerja ini, negara-negara anggota ASEAN juga mengadopsi rencana aksi strategis ketahanan pangan di kawasan. Rencana tersebut bertujuan untuk menerjemahkan kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN ke dalam langkah-langkah strategis yang lebih operasional (FAO, 2023). Implementasi rencana aksi strategis ini berjalan dalam siklus lima tahunan yang dievaluasi dan diperbarui setiap lima tahun untuk menyesuaikan prioritas kawasan dengan dinamika global serta tantangan baru di sektor pangan dan pertanian (AIFS, 2009). Siklus pertama berlangsung pada periode 2009–2013, diikuti siklus kedua pada 2015–2020, dan kini memasuki siklus ketiga yang berlangsung dari tahun 2021 hingga 2025 (FAO, 2023).

Kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN mencerminkan prinsip, aturan, dan norma yang disepakati bersama, di mana negara-negara anggota ASEAN berkolaborasi untuk menghadapi tantangan bersama di sektor pangan (ASEAN, 2009). Melalui kerangka kerja ini, ASEAN tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional tetapi juga mendorong pengintegrasian kebijakan pangan di tingkat regional, menciptakan pasar pangan yang lebih terhubung, dan mengurangi ketergantungan pada impor dari luar kawasan (AIFS, 2009). Pada siklus strategis ketiga (2021–2025), perhatian lebih besar diberikan pada pembangunan sistem pangan yang berkelanjutan dan tangguh. Fokus ini mendorong ASEAN untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian melalui penguatan upaya adaptasi, promosi praktik pertanian yang ramah lingkungan, serta peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam (FAO, 2023). Selain itu, pemeliharaan cadangan pangan regional dilaksanakan melalui kerja sama cadangan beras darurat ASEAN plus tiga, yang melibatkan mitra negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Kerja sama ini memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan pasokan pangan darurat saat terjadi krisis, bencana alam, atau gangguan pasokan (ASEAN, 2023). Kerja sama tersebut telah menjadi elemen kunci dalam kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN, khususnya dalam menjamin keamanan pangan selama masa krisis (Wibisono, 2017). Dalam beberapa kesempatan, cadangan beras ASEAN plus tiga telah didistribusikan kepada negara-negara anggota yang menghadapi kelangkaan pangan akibat bencana alam atau gangguan pasokan. Hal ini menunjukkan keberhasilan ASEAN, melalui kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN dalam menciptakan mekanisme solidaritas yang efektif untuk menghadapi krisis (Trethewie, 2013). Seiring berjalannya waktu, kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN terus berkembang, menciptakan fondasi yang kokoh bagi stabilitas pangan di kawasan ini, serta diharapkan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa depan (ASEAN, 2020).

Berbagai kerja sama ketahanan pangan yang telah dilaksanakan oleh ASEAN dapat dianalisis dalam perspektif kerja sama internasional menurut K.J. Holsti. Dalam teorinya, Holsti menjelaskan bahwa kerja sama internasional merupakan hasil dari kepentingan bersama, interdependensi antarnegara, dan kebutuhan untuk menciptakan stabilitas di kawasan (Holsti, 1988). Berdasarkan perspektif ini, berbagai inisiatif kerja sama ASEAN, seperti perjanjian cadangan keamanan pangan ASEAN, cadangan keamanan pangan ASEAN, cadangan beras darurat ASEAN plus tiga negara mitra, dan kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN mencerminkan upaya untuk mencapai stabilitas dan ketahanan pangan melalui pengelolaan interdependensi antarnegara di kawasan ASEAN. Selain itu, dalam konsep yang dikemukakan oleh Holsti, berbagai inisiatif tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun keamanan kolektif, mengurangi potensi konflik di kawasan, dan mendorong terciptanya kepentingan bersama di antara negara-negara anggota (Holsti, 1988).

Program kerja sama ketahanan pangan ASEAN, dalam indikator kerja sama internasional K.J. Holsti yang menekankan keselarasan kepentingan, kebijakan, serta transaksi antarnegara. Berbagai kerja sama tersebut menunjukkan adanya kesamaan tujuan negara-negara ASEAN dalam menjaga stabilitas pangan melalui cadangan pangan darurat dan peningkatan produksi pertanian (Holsti, 1988). Kerja sama tersebut mencerminkan kesepakatan formal negara-negara ASEAN dalam menyisihkan stok pangan regional, dan juga dengan memperluas kerja sama dengan melibatkan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan untuk memastikan cadangan beras saat terjadi krisis. Program ini juga mencerminkan kesadaran bahwa kebijakan pangan satu negara dapat berdampak pada negara lain, seperti peran Thailand dan Vietnam sebagai eksportir utama bagi negara-negara pengimpor seperti Filipina dan Indonesia (Holsti, 1988). Penetapan aturan dan kebijakan jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan yang dibuat ASEAN juga mencerminkan kerja sama berbasis regulasi dan transaksi antarnegara yang mendukung stabilitas pasokan pangan kawasan, yang mana hal ini sesuai dengan konsep kerja sama internasional Holsti karena dibangun atas dasar kesamaan kepentingan, mekanisme penyelesaian masalah kolektif, serta transaksi yang mendukung ketahanan pangan jangka panjang bagi seluruh negara anggota (Holsti, 1988).

B. Analisis Kerja Sama ASEAN Dalam Mendorong Ketahanan Pangan Regional

Analisis kerja sama ASEAN dalam bab ini akan dilakukan dengan menggunakan empat dimensi utama dalam teori atau konsep ketahanan pangan, yaitu ada ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, pemanfaatan pangan, dan juga ada stabilitas pangan (FAO, 2006). Ketersediaan pangan adalah dimensi dalam ketahanan pangan yang akan melihat bagaimana dorongan yang dilakukan ASEAN untuk dapat memenuhi ketersediaan terhadap pangan mulai dari produksi dan pasokan pangan untuk dapat memenuhi ketahanan pangan ASEAN (FAO, 2006). Akses terhadap pangan merupakan dimensi yang akan melihat bagaimana negara anggota ASEAN dapat memiliki akses untuk mendapatkan atau menerima pangan (FAO, 2006). Pemanfaatan pangan yang mana dimensi ini akan memfokuskan pada besarnya pemanfaatan yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam memanfaatkan ketersediaan pangan yang dimiliki nya (FAO, 2006). Selain itu dalam ketahanan pangan ada juga dimensi stabilitas pangan yang akan membahas mengenai dorongan yang dilakukan oleh ASEAN untuk dapat menghadapi permasalahan dan tantangan di masa depan dengan menjaga stabilitas pangan di kawasan (FAO, 2006). Oleh karena itu bab ini bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman mengenai analisis kerja sama yang dilakukan oleh ASEAN untuk dapat mendorong ketahanan pangan di regional dalam konsep ketahanan pangan.

B.1. Ketersediaan Pangan

Permasalahan ketahanan pangan yang dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN menimbulkan berbagai tantangan dalam aspek pemenuhan ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan merupakan salah satu dimensi utama dalam konsep ketahanan pangan, yang merujuk pada sejauh mana pangan dapat diakses oleh masyarakat. Dimensi ini mencakup jumlah dan kualitas pangan yang tersedia secara memadai sesuai dengan standar yang berlaku, baik melalui produksi domestik, impor, maupun bantuan pangan yang diterima (FAO, 2006). Dalam konteks ketersediaan pangan, pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, aman untuk dikonsumsi, bernutrisi, serta sesuai dengan budaya masyarakat setempat (FAO, 2006). Hal ini tercermin dalam laporan yang diterbitkan oleh ASEAN melalui prospek komoditas pertanian ASEAN, yang memuat data produksi pangan dari negara-negara anggota ASEAN untuk periode 2023–2025. Laporan tersebut menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan ketersediaan pangan di kawasan ASEAN (AFSIS, 2024).

Untuk memastikan ketersediaan pangan di kawasan, ASEAN menetapkan perjanjian cadangan ketahanan pangan ASEAN, yang merupakan sebuah perjanjian yang di tandatangani oleh negara anggota ASEAN pada tahun 1979, dimana perjanjian tersebut dirancang untuk menciptakan cadangan pangan di kawasan regional ASEAN, yang dapat digunakan ketika terjadi krisis pangan di kawasan (ASEAN, 1979). Fokus utama dari perjanjian kerja sama tersebut adalah pembentukan cadangan pangan strategis, terutama beras. Dalam kerangka perjanjian tersebut, negara-negara anggota sepakat untuk menyisihkan sebagian stok beras guna membantu anggota lain yang menghadapi kekurangan pangan secara mendadak (ASEAN, 1979). Cadangan pangan tersebut diwujudkan dalam perjanjian tersebut yang menjelaskan bahwasanya negara-negara anggota diharapkan dapat menyumbang cadangan beras yang dimilikinya. Negara anggota memberikan cadangan berasnya yaitu, diantaranya Thailand menyumbang cadangan sebanyak 15.000 ton, Indonesia menyumbang cadangan beras nya sebanyak 12.000 ton, Malaysia menyumbang cadangan beras sebanyak 6.000 ton, Filipina dan Singapura sebanyak 5.000 ton, dan Brunei Darussalam sebanyak 3.000 ton (ASEAN, 1979). Komitmen ini menunjukkan upaya ASEAN untuk meningkatkan ketersediaan pangan darurat sebagai antisipasi terhadap krisis pangan di masa depan.

Seiring berjalannya waktu, terdapat pengembangan dalam kerja sama cadangan ketahanan pangan ASEAN dimana terdapat pengembangan dalam konsep cadangan pangan yang diperluas dengan menambah partisipasi negara mitra ASEAN untuk dapat memperkuat cadangan beras darurat regional (ASEAN, 2011). Negara mitra ASEAN seperti Jepang, Korea Selatan, dan China yang disebut ASEAN plus tiga negara mitra (ASEAN, 2024). Kerja sama cadangan beras darurat ASEAN plus tiga secara resmi aktif pada tanggal 28-29 Maret 2013 saat pertemuan pertama dewan pengawas kerja sama. Kerja sama tersebut tidak saja menyediakan stok beras darurat, namun juga menciptakan mekanisme distribusi yang lebih efektif ketika terjadi bencana alam atau fluktuasi produksi pangan (ASEAN, 2011).

Kerja sama cadangan beras darurat ASEAN plus tiga memastikan bahwa beras, sebagai pangan pokok utama ASEAN, selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, dan dapat digunakan untuk menghadapi gangguan produksi musiman yang dapat mengganggu ketersediaan pangan. Kerja sama cadangan beras darurat ASEAN plus tiga saat ini memiliki stok cadangan beras, yang dapat dialokasikan berjumlah sebanyak 787.000 ton. Stok tersebut terdiri dari 87.000 ton berasal dari negara-negara ASEAN, dan sebanyak 700.000 ton berasal dari negara-negara plus tiga (APTERR, 2023). Selain itu juga perdagangan intra-regional yang dilakukan oleh ASEAN plus tiga juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan ketahanan pangan di negara-negara ASEAN dan negara-negara mitra, dengan menghasilkan peningkatan dalam sektor produksi pangan yang berpengaruh dalam ketersediaan pangan dari negara-negara ASEAN dan negara mitra ASEAN lainnya (Yudhatama, Nurjanah, Diarningtyas, & Revindo, 2021). Dengan berbagai inisiatif yang dilakukan oleh ASEAN dengan kerja sama dan perjanjian yang telah dilakukan, dalam pemenuhan ketersediaan pangan telah menunjukkan komitmen yang kuat dari ASEAN untuk dapat memastikan ketersediaan pangan di kawasan (FAO, 2006).

B.2. Akses Pangan

Pemenuhan ketahanan pangan tidak lepas kaitan nya dengan akses terhadap pangan, hal ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan (FAO, 2006). Permasalahan yang dihapai oleh ASEAN terhadap pemenuhan ketahanan pangan, melihat bagaimana akses yang dapat dilakukan terhadap pangan tersebut untuk dapat digunakan oleh masyarakat ASEAN. Dalam akses pangan ASEAN mengimplementasikan sejumlah rancangan untuk

dapat memastikan pangan tersebut dapat diakses oleh negara-negara anggota ASEAN (FAO, 2006). Dimensi akses pangan yang terdapat dalam ketahanan pangan, yaitu dimensi yang melihat dengan mengukur bagaimana kemampuan individu untuk, memperoleh sumber daya yang memadai guna mendapatkan makanan bergizi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (FAO, 2006). Hal tersebut menjadi perhatian ASEAN dalam menerapkan programnya dan kerja sama yang akan dilakukan untuk dapat mencapai ketahanan pangan di kawasan. kerja sama cadangan beras darurat ASEAN plus tiga merupakan salah satu inisiasi paling signifikan yang dilakukan ASEAN dalam meningkatkan akses pangan di kawasan ASEAN (APTERR, 2023).

Kerja sama tersebut menjadi inisiasi yang dirancang untuk menyediakan cadangan beras darurat yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota ASEAN beserta mitra plus three yaitu Jepang, Korea Selatan, dan China yang dimana hal tersebut dapat dilakukan dalam menghadapi situasi darurat atau bencana alam (APTERR, 2023). Pelepasan cadangan beras ASEAN dapat dilakukan ketika keadaan darurat, dimana keadaan darurat tersebut didefinisikan sebagai kondisi atau keadaan suatu negara anggota ASEAN atau negara mitra mengalami bencana ekstrem yang tidak terduga, tidak mampu untuk dapat mengatasi keadaan tersebut melalui cadangan nasionalnya, dan tidak mampu untuk mendapatkan pasokan beras yang dibutuhkan melalui perdagangan normal (APTERR, 2023). Selama prosesnya, untuk dapat mengakses cadangan beras yang ada tersebut, APTERR memiliki mekanisme pemanfaatan cadangan beras yang terbagi-bagi menjadi tiga jenis tingkatan program pemanfaatan, atau disebut sebagai “Tiers” yang dirancang untuk berbagai situasi darurat (APTERR, 2023). Tingkatan pemanfaatan tersebut yang pertama, tingkatan 1 melibatkan pelepasan cadangan beras darurat yang dialokasikan untuk situasi darurat kecil, dengan diformulasikan sebagai kontrak berjangka pendek yang menyatakan jumlah dan mutu beras tertentu, metode penetapan harga, ketentuan pembayaran dan pengiriman, dan persyaratan lain antara negara pemasok dan juga negara penerima, serta pembayaran yang dilakukan berdasarkan harga pasar internasional yang berlaku (APTERR, 2023).

Tingkatan 2 dalam mekanisme pemanfaatan cadangan beras darurat ASEAN plus tiga yaitu dengan melibatkan pelepasan cadangan beras darurat yang dialokasikan berdasarkan perjanjian lain, untuk keadaan darurat yang tidak dapat diantisipasi dan ditangani pada tingkatan 1, pengiriman bantuan tersebut mengikuti kesepakatan antara negara pemasok dan negara penerima, serta penetapan harga pada tingkatan 2 dapat dilakukan secara tunai atau melalui pinjaman maupun hibah jangka panjang berdasarkan kesepakatan bersama dari negara-negara yang terlibat (APTERR, 2023). Pada program pemanfaatan cadangan beras darurat ASEAN di tingkatan 3 ini melibatkan pelepasan cadangan beras darurat yang ditimbun yang dikontribusikan untuk keadaan darurat yang parah dan respon kemanusiaan, seperti membantu pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kekurangan gizi, untuk memastikan keamanan pangan di wilayah tersebut (APTERR, 2023). Distribusi yang dilakukan pada tingkatan 3 ini dapat dilakukan atas dasar permintaan untuk menanggulangi bencana, dapat dilepaskan secara otomatis untuk respon cepat dalam menghadapi bencana, serta untuk menanggulangi kemiskinan atas dasar bantuan kemanusiaan (APTERR, 2023).

Kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN membantu negara-negara anggota ASEAN menjaga harga pangan lokal agar tetap terjangkau (AIFS, 2009). Hal ini dapat dilihat melalui cadangan beras darurat ASEAN plus tiga yang dapat dipinjam ketika terjadi krisis harga atau ketidakstabilan pasokan (APTERR, 2023). Dengan menjaga harga tetap stabil kerangka kerja juga memastikan akses terhadap pangan yang lebih aman bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang ekonominya rentan terhadap perubahan harga pangan, selain itu kerangka kerja juga mendorong pengembangan infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan,

gudang penyimpanan, dan fasilitas transportasi yang mendukung distribusi pangan (AIFS, 2009). Kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN juga dengan mendorong perdagangan pangan intra-ASEAN dan mengurangi hambatan perdagangan yang memungkinkan negara-negara anggota untuk saling bertukar pangan dan hal ini memperluas jangkauan akses pangan di kawasan, serta memungkinkan distribusi pangan yang lebih cepat terutama ketika terjadi kekurangan pangan di suatu wilayah (ASEAN, 2012).

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di ASEAN, aspek akses terhadap pangan menjadi komponen penting dalam memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan (FAO, 2006). ASEAN melaksanakan berbagai kerja sama yang salah satunya mengatur mekanisme akses terhadap pangan di kawasan. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah cadangan beras darurat ASEAN plus tiga yang mengatur bagaimana cadangan pangan, khususnya beras, dapat diakses oleh negara-negara anggota ASEAN beserta negara mitra yang membutuhkan bantuan pangan. Mekanisme cadangan beras darurat ASEAN plus tiga yaitu terdapat tiga tingkatan program yang dirancang untuk memfasilitasi akses pangan tersebut (APTERR, 2023). Selain kerja sama tersebut terdapat kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN yang berperan dalam mengalokasikan cadangan pangan di ASEAN guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan kawasan ASEAN (AIFS, 2009). Inisiatif-inisiatif ini mencerminkan komitmen kuat ASEAN dalam menciptakan kawasan yang stabil, damai, dan saling menghormati, sesuai dengan tujuan pembentukan organisasi ASEAN. Selain itu, ASEAN terus berupaya meningkatkan akses pangan bagi seluruh masyarakat di kawasan, baik dalam situasi normal maupun saat terjadi krisis pangan. (ASEAN, 2024).

B.3. Pemanfaatan Pangan

Untuk mencapai ketahanan pangan, aspek pemanfaatan pangan memiliki peran penting dalam melihat bagaimana pangan dapat dimanfaatkan (FAO, 2006). Dalam konteks pemanfaatan pangan, ASEAN mengambil beberapa langkah dalam kerja sama dan perjanjian regional yang membahas terkait pemanfaatan pangan (ASEAN, 2008). Pemanfaatan pangan mencakup bagaimana kemampuan untuk memanfaatkan pangan melalui pola makan yang cukup, akses terhadap air bersih, kualitas pangan, sanitasi, keamanan pangan, serta perawatan kesehatan yang memadai guna mencapai kesejahteraan gizi dan memenuhi kebutuhan fisiologis (FAO, 2006). Fokus pemanfaatan pangan yaitu dengan memastikan bahwa, bukan hanya ketersediaan dan juga akses terhadap pangan saja yang menjadi perhatian untuk dapat mencapai ketahanan pangan, tetapi juga bagaimana pangan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ASEAN (FAO, 2006). Fokus pemanfaatan pangan tersebut tercermin dalam beberapa kerja sama dan perjanjian yang dilakukan ASEAN salah satunya yaitu kerangka kerja ketahanan pangan terpadu ASEAN (AIFS, 2009).

Kerangka kerja ketahanan pangan terpadu ASEAN tidak hanya berfokus terhadap ketersediaan dari pangan saja namun juga kerangka kerja ketahanan pangan ASEAN tersebut menekankan pentingnya keamanan pangan dan kualitas pangan untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik (AIFS, 2009). Salah satu pilar dalam kerangka kerja ketahanan pangan terpadu ASEAN yaitu adalah penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan standar keamanan pangan dan penerapan praktik yang sesuai di seluruh rantai pasok pangan yang ada (FAO, 2023). Hal tersebut termasuk juga dalam memastikan bahwa makanan yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta bebas dari kontaminasi dan penyakit, serta pangan tersebut mengandung nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat (AIFS, 2009). ASEAN juga mendorong upaya dalam peningkatan gizi masyarakat melalui program yang dilakukannya untuk dapat meningkatkan pemanfaatan pangan di area kawasan

ASEAN, dan hal tersebut dapat terlihat dalam laporan yang dimuat oleh ASEAN dalam kerangka kerja ketahanan pangan terpadu (FAO, 2006).

Dalam dimensi pemanfaatan pangan, ASEAN melalui forum kerja samanya, yakni Forum Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN, memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan gizi dan keamanan pangan di kawasan (ASEAN, 2019). Forum ini bekerja sama dengan negara anggota untuk memastikan bahwa seluruh proses pertanian, mulai dari produksi hingga distribusi pangan, berlangsung dengan aman dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, forum ini juga berfokus pada pengembangan produk pangan bernutrisi serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pangan yang dihasilkan (Nurwanti, 2010). Pengimplementasian dari forum menteri pertanian dan kehutanan ASEAN tersebut yaitu dengan berperan dalam mengembangkan sistem standar keamanan pangan regional, dimana hal tersebut bertujuan untuk dapat melindungi konsumen dari produk pangan yang tidak aman dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan pangan untuk dapat mencapai ketahanan pangan di kawasan (ASEAN, 2019). Standar tersebut membantu negara-negara anggota ASEAN untuk dapat mematuhi pedoman internasional yang ditetapkan oleh Codex Alimentarius yang merupakan pedoman yang dibuat oleh FAO dan WHO (FAO, 2005). Salah satu standar keamanan pangan regional oleh forum menteri pertanian dan kehutanan ASEAN tersebut adalah kebijakan ketahanan pangan yang didalamnya berisi sepuluh prinsip dalam kebijakan keamanan pangan (ASEAN, 2016).

Kebijakan ketahanan pangan ASEAN merupakan kebijakan yang mengatur strategi dan prioritas ASEAN dalam memastikan keamanan pangan di seluruh rantai pasok pangan, mulai dari produksi hingga pemanfaatan atau konsumsi terhadap pangan, yang berperan dalam menyelaraskan kebijakan keamanan pangan antar negara anggota, sehingga adanya keseragaman dalam penerapan standar keamanan pangan (ASEAN, 2016). Hal tersebut dimuat dalam sepuluh prinsip kebijakan keamanan pangan yang berisi, pendekatan rantai pangan, kerangka kerja analisis risiko sistematis, berbasis sains, proses penilaian risiko, tanggung jawab operator bisnis pangan, konsistensi dengan perjanjian ATIGA dan perjanjian TBT, kesetaraan dan pengakuan bersama, harmonisasi dengan standar internasional, sistem pencatatan yang andal, penguatan harmonisasi terhadap sistem pengawasan pangan regional dan nasional serta adanya transparansi (ASEAN, 2016). Dilihat dalam perspektif pemanfaatan pangan kebijakan, kerja sama, dan kerangka kerja yang telah dibuat ASEAN merupakan upaya untuk pemanfaatan pangan yang aman, bergizi serta layak untuk masyarakat ASEAN (FAO, 2006). Hal tersebut di implementasikan oleh ASEAN dalam kerja sama dan kebijakan yang dimuat dalam

Dimensi pemanfaatan pangan dalam perspektif Peter Hough, melihat bahwa dimensi pemanfaatan pangan adalah sebuah dimensi yang penting, dikarenakan pemanfaatan pangan yang mencakup aspek keamanan, nutrisi, dan kualitas pangan (Hough, 2023). Didalam konteks kerja sama ASEAN kebijakan dan kerja sama yang dilakukan menunjukkan upaya kolektif dari ASEAN untuk dapat memastikan bahwa pangan tidak hanya tersedia tetapi juga aman dan bernutrisi bagi masyarakat di kawasan. Terlihat dari kerangka kerja keamanan pangan terpadu ASEAN yang berfokus pada penyediaan pangan berkualitas melalui distribusi yang merata. Forum yang dihadiri para menteri pertanian dan kehutanan ASEAN yang mengoordinasikan kebijakan sektor pertanian untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan (ASEAN, 2019). Selain itu, kebijakan ketahanan pangan ASEAN juga memperkuat standar keamanan pangan melalui harmonisasi peraturan, pengawasan kualitas, dan peningkatan kapasitas di tingkat regional (ASEAN, 2016). Perspektif Peter Hough, melihat bahwa berbagai kerja sama dan kebijakan ini menunjukkan pendekatan

holistik ASEAN, dalam mengintegrasikan ke dalam kebijakan pangan regional, sehingga menciptakan ketahanan pangan yang tidak hanya fokus pada ketersediaan dan akses, tetapi juga pada aspek kualitas dan manfaat pangan bagi masyarakat (Hough, 2023).

Melalui forum AMAF, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan pemanfaatan pangan. Namun, data indeks menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum memberikan hasil yang merata di seluruh negara anggota (Nurwanti, 2010). Misalnya, negara-negara seperti Vietnam (11,4) dan Thailand (10,4) berhasil mempertahankan indeks rendah, sementara negara-negara lainnya masih menunjukkan kerentanan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan pelaksanaan kebijakan secara spesifik di tingkat nasional, dengan memperhatikan kondisi lokal, peningkatan kapasitas produksi, dan distribusi pangan yang lebih adil (GHI, 2023). ASEAN juga perlu mendorong pemanfaatan teknologi pertanian dan pendekatan berbasis keberlanjutan untuk memastikan kerangka kerja keamanan pangan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi kawasan secara keseluruhan.

B.4. Stabilitas Pangan

Untuk dapat mencapai ketahanan pangan diperlukan adanya stabilitas akan pangan, yang mana dimensi Stabilitas Pangan diperlukan untuk mencapai tujuan dalam terpenuhinya ketahanan pangan (FAO, 2006). Stabilitas Pangan yaitu memastikan ketersediaan dan akses terhadap pangan yang stabil dan aman, sehingga setiap individu dapat memiliki akses memadai setiap saat (FAO, 2006). Dimensi stabilitas pangan ini berfokus kepada ketersediaan pangan yang stabil dan aman, dalam menghadapi guncangan eksternal seperti bencana alam, perubahan iklim, fluktuasi ekonomi, atau harga pangan. Stabilitas Pangan menyatakan bahwasanya ketersediaan pangan harus dipertahankan tidak hanya dalam kondisi normal tetapi juga ketika dalam kondisi tidak menentu (FAO, 2006).

Stabilitas pangan menjadi dimensi penting bagi ASEAN, untuk mencapai ketahanan pangan di kawasan. Hal ini mendorong ASEAN untuk menginisiasi berbagai kerja sama dan perjanjian yang berfokus pada stabilitas pangan (FAO, 2006). Salah satu inisiatif utama ASEAN dalam hal ini adalah perjanjian cadangan keamanan pangan ASEAN, yang berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas pangan di kawasan ASEAN (ASEAN, 1979). Untuk memastikan ketersediaan pangan di kawasan, perjanjian tersebut menetapkan cadangan pangan darurat berupa beras yang dapat diakses langsung oleh negara-negara anggota ASEAN saat menghadapi situasi kekurangan pangan akut, seperti bencana alam atau krisis pangan. Perjanjian ini juga menjadi bentuk implementasi ASEAN dalam menjamin ketersediaan stok pangan yang dapat digunakan dalam keadaan darurat (ASEAN, 1979).

Untuk menjaga stabilitas pangan di kawasan, ASEAN mengembangkannya menjadi cadangan beras darurat ASEAN plus tiga untuk memperkuat stabilitas pangan, dengan melibatkan tiga negara mitra ASEAN diantaranya yaitu, China, Jepang, dan Korea Selatan (ASEAN, 2024). Kerja sama tersebut dirancang untuk menyediakan cadangan beras regional seperti perjanjian sebelumnya namun dalam skala yang lebih besar dengan mekanisme distribusi yang jauh lebih cepat serta efisiensi, ketika negara-negara anggota mengalami permasalahan dalam pangan seperti bencana alam, konflik, ataupun krisis ekonomi dapat mengakses cadangan beras tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan darurat negara nya (APTERR, 2023). Cadangan beras darurat ASEAN plus tiga menjadi sistem yang membantu ASEAN dalam menjaga stabilitas dan menyediakan struktur yang lebih tangguh untuk menangani ketidakpastian dan ancaman ketahanan pangan di masa depan (ASEAN, 2011).

Stabilitas pangan tersebut dapat dilihat dalam laporan ASEAN yang dimuat dalam prospek komoditas pertanian ASEAN yang menyebutkan bahwa perkiraan pasokan beras di ASEAN diprediksi naik 8,19 juta ton atau 4,90 persen dari 167,14 juta ton pada 2024, menjadi 175,33 juta ton pada 2025 beras giling (AFSIS, 2024). Adanya peningkatan pasokan jagung ASEAN pada tahun 2025 disebabkan oleh peningkatan stok awal, produksi, dan impor. Pasokan tersebut diperkirakan meningkat sebesar 3,16 juta ton, atau sekitar 4,96 persen dari 63,66 juta ton pada tahun 2024, menjadi sekitar 66,82 juta ton pada tahun 2025. Hal ini juga di ikuti oleh pasokan kedelai ASEAN menunjukkan peningkatan dari 10,00 juta ton pada tahun 2024, menjadi 10,37 juta ton pada tahun 2025, yang mana hal tersebut meningkat 0,37 juta ton atau 3,70 persen (AFSIS, 2024). Selain itu dalam laporan ASEAN tersebut juga memperkirakan bahwa, pasokan singkong ASEAN menunjukkan peningkatan dari 92,87 juta ton pada tahun 2024, menjadi sekitar 97,19 juta ton pada tahun 2025, yang mana hal tersebut meningkat 4,32 juta ton atau sekitar 4,65 persen (AFSIS, 2024). Namun dalam laporan yang dimuat dalam prospek komoditas pertanian ASEAN memperkirakan bahwasanya akan terjadi penurunan pasokan akan gula sekitar 0,98 juta ton atau 2,51 persen, dari yang sebelumnya 39,05 juta ton pada tahun 2024, menjadi sekitar 38,07 juta ton pada tahun 2025 (AFSIS, 2024).

ASEAN telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan kawasan, salah satunya melalui perjanjian cadangan keamanan pangan ASEAN yang kemudian dikembangkan menjadi cadangan beras darurat ASEAN plus tiga negara mitra (APTERR, 2023). Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pangan dengan menciptakan cadangan beras yang siap digunakan dalam situasi krisis (FAO, 2006). Melalui kerja sama yang melibatkan negara mitra tersebut ASEAN berkomitmen untuk mengantisipasi potensi krisis pangan dan memastikan pasokan pangan tetap aman dan terjangkau bagi seluruh negara anggota (APTERR, 2023). Inisiatif ini bukan hanya respons jangka pendek terhadap ketidakpastian pangan global, tetapi juga langkah strategis untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan. Dengan adanya perjanjian ini, ASEAN menunjukkan keseriusannya dalam membangun sistem ketahanan pangan di kawasan regional yang berkelanjutan, serta melindungi kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat solidaritas dan kerja sama di kawasan untuk mencapai keamanan pangan jangka panjang (Kozono, Yamada, & Diyanah, 2023).

Stabilitas pangan, menurut Simon Maxwell dan Rachel Slater, menekankan pentingnya memastikan ketersediaan pangan secara konsisten, baik dari sisi pasokan maupun akses, terlepas dari guncangan seperti bencana alam atau krisis ekonomi (Maxwell & Slater, 2003). Perspektif ini sejalan dengan kebijakan dan kerja sama yang telah diinisiasi oleh ASEAN, yang mencerminkan upaya kolektif untuk menjamin stabilitas pangan di tingkat regional. Langkah-langkah yang dilakukan ASEAN, seperti pembentukan cadangan pangan regional melalui APTERR dan penerapan kerangka kerja keamanan pangan terpadu, dapat dilihat sebagai pendekatan berkelanjutan untuk memastikan kecukupan pangan baik dalam situasi normal maupun saat terjadi krisis. Maxwell dan Slater juga menekankan bahwa stabilitas pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan fisik pangan, tetapi juga pada akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ASEAN yang berfokus pada harmonisasi regulasi, fasilitasi perdagangan, dan peningkatan kapasitas produksi lokal mencerminkan implementasi nyata dari prinsip stabilitas pangan yang berorientasi jangka panjang. (Maxwell & Slater, 2003).

KESIMPULAN

ASEAN menghadapi tantangan serius dalam memenuhi ketahanan pangan akibat pemanasan global, perubahan iklim, dan dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk kerentanan

pangan. Isu ketahanan pangan telah menjadi perhatian sejak berdirinya ASEAN, yang diperkuat melalui berbagai inisiatif regional. Piagam ASEAN yang disahkan pada 2008 menjadi landasan utama dalam menjalankan kerja sama regional dan internasional, termasuk mendukung Deklarasi Bali I tahun 1976 yang ditandatangani oleh lima negara pendiri ASEAN. Deklarasi tersebut menjadi tonggak penguatan solidaritas antarnegara anggota untuk menjaga keamanan regional, yang kemudian diwujudkan melalui forum AMAF (ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry). Forum ini mendorong pembentukan Perjanjian Cadangan Keamanan Pangan ASEAN pada 1979 untuk menjaga ketersediaan beras di kawasan, diikuti pada 2011 oleh program cadangan beras darurat ASEAN Plus Three yang melibatkan China, Jepang, dan Korea Selatan, dengan fokus pada peningkatan volume cadangan serta pengaturan distribusinya. Selain itu, ASEAN juga meluncurkan kerangka kerja keamanan pangan terpadu pada 2009 untuk mengintegrasikan kebijakan pangan serta memastikan stabilitas pangan regional.

Namun, meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, ketahanan pangan ASEAN belum mencapai hasil yang diharapkan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di kawasan ini masih belum dapat menikmati manfaat dari program ketahanan pangan yang dibuat ASEAN. Banyak negara anggota masih berada dalam zona rawan pangan dan menghadapi kelaparan, menandakan bahwa kebijakan dan kerja sama regional belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan. Untuk memperkuat ketahanan pangan di kawasan, diperlukan analisis lebih mendalam terkait distribusi pangan, kendala implementasi program, serta perbedaan kebijakan antarnegara ASEAN. Selain itu, penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengeksplorasi peran negara mitra, seperti kontribusi China, Jepang, dan Korea Selatan, serta peran organisasi internasional dalam mendukung negara anggota ASEAN untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

AFSIS. (2014). *Agricultural Commodity Outlook No.13 December 2014*. Bangkok, Thailand: AFSIS Secretariat Officer of Agricultural Economics (OAE).

AFSIS. (2022). *AFSIS Annual Report 2022 and Future Work Plan*. ASEAN Food Security Information System.

AFSIS. (2024). *ASEAN Agricultural Commodity Outlook*. Bangkok: AFSIS Secretariat Office of Agricultural Economics (OAE) Ministry of Agriculture and Cooperatives.

AIFS. (2009). *2009-2013 ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework and Strategic Plan Of Action on Food Security in The Asean Region (SPA-FS)*. Bangkok: The Secretariat ASEAN.

APTERR. (2023). *APTERR Programmes*. Retrieved from Asean Plus Three Emergency Rice Reserve : <https://www.apterr.org/how-we-work/apterr-programmes>

APTERR. (2023). *FAQ; What Situations Qualify For a Release From APTERR*. Retrieved from Asean Plus Three Emergency Rice Reserve : <https://www.apterr.org/faq>

APTERR. (2023). *FAQ; Why is There a Need For APTERR*. Retrieved from Asean Plus Three Emergency Rice Reserve : <https://www.apterr.org/faq>

APTERR. (2023). *What is APTERR*. Retrieved from Asean Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR): <https://www.apterr.org/what-is-apterr/history2>

- APTERR. (2024, Juli 19). *APTERR Tier 3 activities in 2024*. Retrieved from Asean Plus Three Emergency Rice Reserve: <https://www.apterr.org/how-we-work/apterroperationinformation/operational-information-2/2020-2>
- ASEAN. (1979). *Agreement on The ASEAN Food Security Reserve*. New York, United States of America: Foreign Ministers of ASEAN.
- ASEAN. (1985). *ASEAN and Food Security: A Strategic Perspective*. ASEAN Secretariat Report.
- ASEAN. (2008). *The ASEAN Charter*. Jakarta: Public Affairs Office The ASEAN Secretariat.
- ASEAN. (2009). *Components And Strategic Thrusts Of Asean Integrated Food Security (AIFS) Framework*. Retrieved from The Secretariat ASEAN: <https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/22339.pdf>
- ASEAN. (2011). *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement*. Retrieved from ASEAN Plus Three: <https://aseanplusthree.asean.org/wp-content/uploads/2020/01/ASEAN-Plus-Three-Emergency-Rice-Reserve-Agreement-22.pdf>
- ASEAN. (2011). *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement*. *Center for International Law*, 1-14.
- ASEAN. (2012). *ASEAN International Trade in Service 2005-2011*. EU-ASEAN Statistical Capacity Building Programme.
- ASEAN. (2012, Mei 14). *The Declaration of ASEAN Concord, Bali, Indonesia, 24 February 1976*. Retrieved from The ASEAN Secretariat: <https://asean.org/the-declaration-of-asean-concord-bali-indonesia-24-february-1976/>
- ASEAN. (2015). *Vision and Strategic Plan for ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and Forestry 2016-2025*, 1-22.
- ASEAN. (2015). *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*. Jakarta: The ASEAN Secretariat Public Outreach and Civil Society Division.
- ASEAN. (2015). *Vision and Strategic Plan for ASEAN Cooperation In Food, Agriculture and Forestry 2016-2025*. Makati: ASEAN Secretariat by the Forest and Climate Change Project (FOR-CC).
- ASEAN. (2016). *ASEAN Food Safety Policy*. Jakarta: The ASEAN Secretariat .
- ASEAN. (2018). *ASEAN First Summit in Bali*. Retrieved from The ASEAN Secretariat: <https://asean.org/about-asean/asean-summit/>
- ASEAN. (2018, November 6). *First ASEAN Summit*. Retrieved from Facebook: <https://www.facebook.com/aseansecretariat/photos/in-february-1976-asean-held-its-first-asean-summit-in-bali-convening-heads-of-th/10156919642873854/>
- ASEAN. (2019). *ASEAN Ministers of Agriculture and Forestry (AMAF): Overview and Achievements*. Jakarta: The ASEAN Secretariat.

ASEAN. (2020, November 17). *ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework and Strategic Plan of Action on Food Security (SPA-FS) 2021-2025*. Retrieved from The ASEAN Secretariat: <https://asean.org/wp-content/uploads/2020/11/42-AIFS-Framework-SPAFS-Final-13-July-2020.pdf>

ASEAN. (2020). *ASEAN Sustainable Development Goals Indicators Baseline Report*. Jakarta: The ASEAN Secretariat.

ASEAN. (2022). *Capacity Building Project for Farmer's Organizations to Support the Development of Food Value Chain in ASEAN Countries (CBF)*. The ASEAN Secretariat.

ASEAN. (2023, September 6). *ASEAN-Canada Joint Leaders' Statement on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises*. Retrieved from The ASEAN Secretariat: <https://asean.org/asean-canada-joint-leaders-statement-on-strengthening-food-security-and-nutrition-in-response-to-crises/>

ASEAN. (2023). *FAQ: How was APTERR Started?* Retrieved from Asean Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR): <https://apterr.org/faq>

ASEAN. (2023). *FAQ: What is The Quantity of Earmarked Stock Under APTERR*. Retrieved from Asean Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR): <https://apterr.org/faq>

ASEAN. (2023). *FAQ: What Situations Qualify for a Realise from APTERR?* Retrieved from Asean Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR): <https://apterr.org/faq>

ASEAN. (2024). *Agriculture and Food Cooperation*. Retrieved from The ASEAN Secretariat: <https://asean.org/our-communities/economic-community/enhanced-connectivity-and-sectoral-development/asean-food-agriculture-and-forestry/agriculture-and-food-cooperation/>

ASEAN. (2024). *ASEAN Food, Agriculture, Forestry*. Retrieved from Agriculture and Food: <https://asean.org/our-communities/economic-community/enhanced-connectivity-and-sectoral-development/asean-food-agriculture-and-forestry/>

ASEAN. (2024). *External Relations*. Retrieved from Association of Southeast Asian Nations a Community of Opportunities for all: <https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/outward-looking-community/external-relations/>

ASEAN. (2024). *The ASEAN Journey*. Retrieved from About Asean: <https://asean.org/about-asean/>

ASEAN. (2024). *What We Do ASEAN Aims*. Retrieved Oktober 09, 2024, from Association of Southeast Asian Nation a Community of Opportunities for All: <https://asean.org/what-we-do#fundamental-principles>

Bagaskara, A. M. (2018). Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking di Indonesia. *Journal of International Relation*, 367-375.

Bakry, U. S. (2016). Metode Penelitian Hubungan Internasional. *Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY*, 1-344.

Banjar, R. F. (2023). Analisis Pengaruh Kerja Sama ASEAN Terhadap Isu Keamanan Pangan. *Research Gate*, 1-12.

- Bank, A. D. (2013). Regional: Food Security and Resilience of the Association of Southeast Asian Nations Member States to Food Price Volatility. 1-6.
- Berry, E. M., Dernini, S., Burlingame, B., Meybeck, A., & Conforti, P. (2015). Food security and sustainability: can one exist without the other? *Public Health Nutr*, 2293–2302.
- Briones, R. M. (2012). Climate Change and Price Volatility: Can We Count on the ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve? *Asian Development Bank Sustainable Development Working Paper Series*, 1-20.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods 4th Edition*. OUP Oxford.
- Chandra, A. C., & Lotoh, L. A. (2010). Regional Food Security and Trade Policy in Southeast Asia. *International Institute for Sustainable Development*, 1-29.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Pearson.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles United States of America: SAGE Publications.
- Desker, B. (2017). The 1976 Bali Summit: ASEAN Shifts Gears. In T. Koh, S. S. Li-Lian, & C. L. Lin, *50 Years of ASEAN and Singapore* (pp. 21-34). Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. (1997). *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. Michigan: Longman.
- Erikson, A. (2015). ASEAN Regionalism: The Politics of Agriculture and Food Security. Singapore: NUS Press.
- FAO. (1983). *Asia's Response to Global Food Security Challenges*. FAO Report.
- FAO. (1998). Food Security in Southeast Asia - Achievements and the Unfinished Tasks. *Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for Asia and the Pacific December 1998*.
- FAO. (2002). The State of Food Insecurity in the World 2001. *FAO*.
- FAO. (2005). *Codex Alimentarius Commission*. Rome: FAO and WHO.
- FAO. (2006). *Policy Brief Food Security*. FAO's Agriculture and Development Economics Division (ESA) with support from the FAO Netherlands Partnership Programme (FNPP) and the EC-FAO Food Security Programme.
- FAO. (2008). An Introduction to the Basic Concepts of Food Security. *FAO Food Security Programme*, 1-3.
- FAO. (2009). Declaration of the World Food Summit on Food Security. *FAO*.
- FAO. (2012). Coming to Term With Terminology. *Committee on World Food Security*, 1-14.
- FAO. (2015). *Regional Overview of Food Insecurity Asia and the Pacific*. Bangkok: Regional Office for Asia and the Pacific.

- FAO. (2022). *COVID-19 Pandemic Impacts on Asia and The Pacific*. Bangkok, Thailand: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO. (2022). *The State of Food Security and Nutrition in the World*. Rome: The State of the World series of the FAO.
- FAO. (2023). *ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework and Strategic Plan of Action on Food Security in the ASEAN Region (SPA-FS) 2015-2020*, 1-32.
- FAO. (2023). Urbanization, Agrifood Systems, Transformation, and Health Diets Across The Rural Urban Continuum. *The State of Food Security and Nutrition in The World*, 1-316.
- FAO. (2024). Financing and Hunger, Food Insecurity and Malnutrition in all its forms. *The State of Food Security and Nutrition in The World*, 1-286.
- Fattahi, Z., Singh, P., Bapat, P., Labalme, E., & Kothari, A. (2021). *Economist Impact Global Food Security Index 2021 The 10-year Anniversary*. Washington, DC: Corteva agriscience.
- Freedman, A. (2013). Rice security in Southeast Asia: beggar thy neighbor or cooperation? *The Pacific Review*, 433-454.
- Ganesan, N. (2000). ASEAN's Relations with Major External Power. *Contemporary Southeast Asia*, 258-278.
- GHI. (2022). Food System Transformation and Local Governance. *Global Hunger Index*, 1-60.
- GHI. (2023). The Power of Youth in Shaping Food System. *Global Hunger Index*, 1-60.
- Hakiki, F. (2020). Analisis Dampak Krisis Pangan terhadap Human Security di Etiopia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 127-142.
- Harrington, K., Karim, S., Kothari, A., Labalme, E., Rathod, B. R., Sharma, A., & Singh, P. (2022). *The Economist Impact Global Food Security Index 2022*. Washington, DC: Corteva agriscience.
- Haryanto, I. (2015). Proses Kerja Sama Internasional Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dengan Pemerintah Prancis Utara Dalam Menerapkan Konsep "Blue Economy" di Kawasan Madura Kabupaten Sape. *Global & Policy Vol.3*, 13-31.
- Hasanah, L., & Puspitasari, V. (2019). Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Joint Credit Mechanism (JCM) pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, 142-155.
- Hermanto. (2014). Role of Emergency Rice Reserve in Southeast Asia Region. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 73-85.
- Holsti, K. (1988). *Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis Jilid II Terjemahan M. Tahrir Azhari*. Jakarta: Erlangga.
- Hough, P. (2023). *Understanding Global Security*. New York: Routledge.
- Ikbar, Y. (2014). *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Islam, M. S., & Kieu, E. (2020). Tackling Regional Climate Change Impacts and Food Security Issues: A Critical Analysis across ASEAN, PIF, and SAARC. *Sustainability*, 1-21.
- KEMENTAN. (2023, September 7). *ASEAN Deklarasikan Perkuat Ketahanan Pangan dan Gizi Untuk Hadapi Potensi Krisis*. Retrieved from KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA: <https://pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=5636>
- KEMLU. (2019, April 8). *ASEAN Regional Forum (ARF)*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/en/read/126/halaman_list_lainnya/asean-regional-forum-arf
- KEMLU. (2023, July 11). *FM Marsudi: ASEAN Unity and Centrality Key to Regional Stability*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/en/read/4930/berita/fm-marsudi-asean-unity-and-centrality-key-to-regional-stability#:~:text=%E2%80%9CFor%20more%20than%20five%20decades,peace%2C%20stability%2C%20and%20prosperity.>
- Koh, T., Li-Lian, S. S., & Lin, C. L. (2017). *50 Years of ASEAN and Singapore*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Kominfo. (2023, Mei 22). *Food Security: An ASEAN's Priority*. Retrieved from ASEAN Indonesia 2023: <https://asean2023.id/en/news/food-security-an-aseans-priority>
- Kominfo. (2023, Agustus 8). *Historical Facts of Countries in the ASEAN Region*. Retrieved from ASEAN Indonesia 2023: <https://asean2023.id/en/news/historical-facts-of-countries-in-the-asean-region>
- Kominfo. (2023, September 25). *Leading Resources of ASEAN Member Countries*. Retrieved from Asean2023: <https://asean2023.id/en/news/leading-resources-of-asean-member-countries>
- Kothari, C. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Age Internasional.
- Kozono, M., Yamada, K., & Diyanah, S. M. (2023). Building and Enhancing Sustainable Agriculture and Food Systems in ASEAN: A Preliminary Scoping Study. *ERIA Policy Brief*, 1-4.
- Ladici, H. (2023, Mei 9). *Kini Beranggotakan 10 Negara, Berikut Ini Awal Mula Terbentuknya ASEAN*. Retrieved from Sangalu: <https://www.sangalu.com/nasional/838724224/kini-beranggotakan-10-negara-berikut-ini-awal-mula-terbentuknya-asean>
- Lamberte, M. (2016). *ASEAN Economic Integration: Challenges and Opportunities*. Manila: ADB Press.
- Lestari, H. D. (2008). Komunitas ASEAN: Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Internasional*, 113-137.
- Majid, A. A., Mohamed, Z. M., Majid, A. H., & Norsiah. (2010). *Tapping New Possibilities in Accounting Research, Qualitative Research in Accounting-Malaysian Cases*.

- Maxwell, Frankenbeger, S., & R, T. (1992). Household food security : concepts, indicators, measurements : a techical review / Simon Maxwell and Timothy R. Frankenberger. *Inertnasional Fund for Agricultural Development*, 274.
- Maxwell, S., & Slater, R. (2003). *Food Policy Old and New*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Miles, M. B., Huberman, A., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Miryanti, R., Wijayanti, S., Saadah, K., & Agustiningasih, A. (2023). The Role of ASEAN through ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework in Achieving Indonesia's Food Security. *The 5th International Conference on Multidisciplinary Approaches for Sustainable Rural Development*, 30-37.
- Muhamad, S. V. (2011). Dinamika Perkembangan ASEAN Menuju People Oriented Organization. *Kajian Vol.16*, 493-514.
- Mukhlis, I., Gürçam, Ö. S., Hendrati, I. M., & Utomo, S. H. (2021). Poverty And Food Security: A Reality in ASEAN Countries. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 1-15.
- Nation, U. (1975). Report of the World Food Conference, Rome, 5–16 November 1974. *United Nation*.
- Nurani Wityasari, S. (2022). *Pengertian Ketahanan Pangan Aspek, Tujuan dan Faktor yang Mempengaruhi*. Probolinggo: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo.
- Nurwanti, D. (2010). Food and Agriculture Organization. 1-59.
- Pancawati, M. D. (2023, Agustus 9). *The Urgency of Achieving Food Security to End Hunger*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.id/baca/english/2023/08/09/en-urgensi-mencapai-ketahanan-pangan-untuk-mengakhiri-kelaparan>
- Paulo, S. (2014). International Cooperation and Development a Conceptual Overview. *German Development Institute*, 1-40.
- Peng, W., & Berry, E. M. (2018). The Concept of Food Security. *Encyclopedia of Food Security and Sustainability*, 1-7.
- Peng, W., & Berry, E. M. (2019). The Concept of Food Security. *Encyclopedia of Food Security and Sustainability*, 1-7.
- Randhawa, D. S. (2024). The Challenge of Food (In)security in ASEAN. *RSIS Commentary*, 1-5.
- RI, K. L. (2023, July 13). *Indonesia Dorong Kerja Sama Ketahanan Pangan ASEAN – Kanada*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri RI: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/4965/berita/indonesia-dorong-kerja-sama-ketahanan-pangan-asean-kanada>
- Rivai, S. (2019). *Mari Belajar Ekonomi: Buku Peminatan Ilmu Sosial Kelas XI*. uwa is inspirasi indonesia.
- Saaida, M. (2023). Collaborating for Change: The Power of Multilateral Cooperation in SDGs. *Science For All Publications*, 1-26.

- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press.
- Saraswati, D. P., Darmastuti, S., & Satrio, J. (2023). ASEAN Cooperation in Creating Sustainable Development in the Food Sector: Opportunities and Challenges. *Journal Of Development Research*, 324-334.
- Sato, E. (2010). International cooperation: an essential component of international relations. *RECIIS*, 1-11.
- Security, C. o. (2003). *Human Security Now: Protecting and Empowering People*. New York: Commission on Human Security.
- Singh, P., Bhandari, R., & Bapat, P. (2020). *Global Food Security Index 2020 Addressing structural inequalities to build strong and sustainable food systems*. Washington, DC: Corteva agriscience.
- Siswo, D. (2021, April 5). *ASEAN Pegang Peran Penting Pada Perkembangan Global*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia in Diplomasi: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2334/berita/asean-pegang-peran-penting-pada-perkembangan-global>
- Sudagung, A. D. (2015). Kerjasama Pembangunan Indonesia dan Uni Eropa: Suatu Analisis Teori Liberalisme dalam Hubungan Internasional. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 31-41.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukrke, A. (1999). Human Security and the Interests of States. *Security Dialogue*, 265-276.
- Sundram, P. (2023). Food security in ASEAN: progress, challenges and future. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 1-14.
- Sundram, P. (2023). Food security in ASEAN: progress, challenges and future. *Frontiers*, 1-14.
- Szudy, M. (2015). Agriculture In The Southeast Asian Countries Under Globalization. 146-156.
- Teng, P. P., Anthony, M. C., & Montesclaros, J. L. (2021). ASEAN Responses to Covid-19 for Assuring Food Security. *Advances in Food Security and Sustainability*, 83-118.
- Trethewie, S. (2013). The ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR): Cooperation, commitment and contradictions. *Centre for Non-Traditional Security (NTS) Studies*, 1-20.
- UNDP. (1994). New Dimensions of Human Security. *Human Development Report*, 22-44.
- UNDP. (2023). *Global Multidimensional Poverty Index*. United Nations Development Programme and Oxford Poverty and Human Development Initiative.
- USDA. (n.d.). *South East Asia Crop Production Maps*. Retrieved from Foreign Agricultural Service US Department of Agriculture: https://ipad.fas.usda.gov/rssiws/al/seasia_cropprod.aspx

- Utomo, S. J., & Baskoro, H. A. (2019). Productivity Of Indonesian Agriculture: Study In Asean State. *JIEP*, 101-106.
- Wardani, A. K., & Budiawan, A. (2021). Urgensi Kerja Sama Internasional Dalam Konsep Sound Governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 547-554.
- Wibisono, R. P. (2017). Implementasi Program ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) di Indonesia Pasca Erupsi Merapi Tahun 2012. *Skripsi thesis*, 1-20.
- Woon, W. (2008). *The ASEAN Charter: A Legal Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yudhatama, P., Nurjanah, F., Diarningtyas, C., & Revindo, M. D. (2021). Food Security, Agricultural Sector Resilience, and Economic Integration: Case Study of ASEAN+3. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 89-109.
- Zhou, Y., & Chen, K. Z. (2023). Food Price Inflation in East and Southeast Asia: Situation, Driving Forces, and the Outlook. *Studies in Agricultural Economics*, 77-86.